

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Djojosoekarto, Agung, and Dkk. *Grand Strategy Penataan Daerah Tahun 2005*. Jakarta: Kemitraan, 2008.
- Gatiningsih dan Sutrisno, Eko. *Kependudukan Dan Ketenagakerjaan. Modul Mata Kuliah*. Sumedang: Fakultas Manajemen Pemerintahan IPDN, 2017. [http://eprints.ipdn.ac.id/2402/1/Buku GATI dan EKO Kependudukan LENGKAP.pdf](http://eprints.ipdn.ac.id/2402/1/Buku_GATI_dan_EKO_Kependudukan LENGKAP.pdf).
- Hakim, Lukman. *Filosofi Kewenangan Organ Dan Lembaga Daerah: Perspektif Teori Otonomi & Desentralisasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Hukum Dan Kesatuan*. Malang: Setara Press, 2012.
- Huda, Nurul. *Ekonomi Pembangunan Islam*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Kansil, C.S.T. *Desa Kita: Dalam Peraturan Tata Pemerintahan Desa*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Manan, Bagir. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Cetakan IV. Yogyakarta: PSH Fakultas Hukum UII, 2005.
- Nazir, Mohammad. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.
- Rahayu, Sri Ani. *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, Dan Aplikasinya*. Malang: Sinar Grafika, 2017.
- Siswanto, Sunarno. *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Grafindo Persada, 2003.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: alfabeta, 2018.
- . *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: alfabeta, 2018.
- Suharizal dan Muslim Chaniago. *Hukum Pemerintahan Daerah Setelah Perubahan UUD 1945*. Yogyakarta: Thafa Media, 2017.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017.

- Sumitro, Ronny Hanitiyo. *Metode Penelitian Hukum Dan Jumeetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penlelitian Hukum*. Cetakan ke. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Taufani, Suteki dan galang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Widjaja, H.A.W. *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

JURNAL DAN INTERNET

- Arfa'i. "Bentuk Negara Republik Indonesia Ditinjau Pengaturan Tentang Pemerintahan Daerah Dalam Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 7 (2013).
- Faiq, Nuraeni. "Alasan Pemkot Surabaya Merger Kelurahan Perak Timur Dan Perak Barat Jadi Kelurahan Tanjung Perak - Surya,".
- Hastuti, Proborini. "Desentralisasi Fiskal Dan Stabilitas Politik Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Indonesia." *Simposium Nasional Keuangan Negara* 1, no. 1 (2018): 1–16.
<https://jurnal.bppk.kemenkeu.go.id/snkn/article/view/293>.
- Hidayat, Anto. "Dimensi Kependudukan Dalam Pembangunan Berkelanjutan Di Kota Tangerang Selatan." *Universitas Terbuka*, 2012.
- Jeddawi, Murtir, Abdul Rahman, and M. Nawawi. "Studi Kemungkinan Perubahan Status Desa Teluk Kapuas Menjadi Kelurahan Di Kabupaten Kubu Raya." *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa* 3, no. 1 (2018): 31–50.
doi:10.33701/jipsk.v3i1.301.
- Kartika;, I Ketut Rai Setiabudhi;Piers Andreas Noak;I Gusti Ayu Putri. "Keberadaan Kelurahan Dalam Perspektif UU Desa." *Keberadaan Kelurahan Dalam Perspektif Uu Desa*, 2017.
- Meriyati dan Mohammad Faizal. "OTONOMI DAERAH PRESPEKTIF ASY SYAIBANI (Studi Kasus Otonomi Daerah Di Kecamatan Gandus Palembang Sumatera Selatan),".
- Rindengan, Marini. "Kepemimpinan Lurah Dalam Pelayanan Administrasi Di Kelurahan Tinoor I Kecamatan Tomohon Utara." *Jurnal Politico* 5, no. 1

(2016). <https://www.neliti.com/publications/1167/kepemimpinan-lurah-dalam-pelayanan-administrasi-di-kelurahan-tinoor-i-kecamatan>.

Robial, Daniel Filterianto. “Peran Pemerintah Kelurahan Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik.” *Manajemen Ekonomi*, 2017, 1–15. <https://www.neliti.com/id/publications/1137/peran-pemerintah-kelurahan-dalam-mewujudkan-kepemerintahan-yang-baik-studi-di-ke>.

Said, Abdul Rauf Alauddin. “Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat - Pemerintah Daerah Dalam Otonomi Seluas - Luasnya Menurut UUD 1945.” *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 4 (2015): 505–30. <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/viewFile/613/552>.

Sani, Abdul. “Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM Daerah | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.” <https://bkpsdmd.Babelprov.Go.Id/>, 2017. <https://bkpsdmd.babelprov.go.id/content/otonomi-daerah-esensi-tujuan-dan-manfaatnya-bagi-provinsi-kepulauan-bangka-belitung>.

Yudi, Elya. “Wawali Armuji Kawal Proses Penggabungan Kelurahan Perak Utara Dan Perak Timur - NAWACITAPOST.” *Nawacitapost*, 2022. <https://nawacitapost.com/nasional/daerah/2022/06/02/wawali-armuji-kawal-proses-penggabungan-kelurahan-perak-utara-dan-perak-timur/>.

Laporan

Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Pemerintah Kota Surabaya. “Laporan Akhir Kajian Penataan Wilayah Kecamatan Di Kota Surabaya.” Surabaya, 2017.

Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kota Surabaya. “RANGKUMAN KEGIATAN RENCANA PENGGABUNGAN KELURAHAN PERAK UTARA DAN KELURAHAN PERAK TIMUR.” Surabaya, 2022.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Kecamatan;

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Kelurahan;

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya;

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penggabungan Kelurahan Perak Utara dan Kelurahan Perak Timur pada Kecamatan Pabean Cantian Kota Surabaya;

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 84 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penggabungan Kelurahan Perak Utara dan Kelurahan Perak Timur pada Kecamatan Pabean Cantian Kota Surabaya;

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Surabaya;

Peraturan Walikota Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Surabaya;

Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/265/436.1.2/2021 tentang Nomenklatur dan Tugas Sub Koordinator pada Sekretariat Daerah Kota Surabaya.

LAMPIRAN

A. Surat Keterangan Melaksanakan Penelitian pada Lembaga Pemerintah Kota Surabaya



PEMERINTAH KOTA SURABAYA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

Nomor : 500.16.7.4 / 1526 / S / RPM /
436.7.15 / 2023
Lampiran : 1 Lembar
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Surabaya, 17 April 2023
Kepada
Yth. (terlampir)
di -
Surabaya

REKOMENDASI PENELITIAN

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian
 3. Peraturan Walikota Surabaya No 41 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan
 4. Persetujuan Teknis Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surabaya Nomor 000.9.2/6059/436.8.6/2023 Tanggal 17 April 2023
- Memperhatikan :
- Surat dari An. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur Sekretaris Nomor 0702708/209/2023 Tanggal 14 April 2023 Perihal Surat Keterangan Penelitian.
- Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya memberikan Rekomendasi kepada :
- a. Nama : ARUNG SETYAWAN
b. Alamat : JLASEM MULYA VII NO. 3
c. Pekerjaan/Jabatan : MAHASISWA
d. Instansi/Organisasi : UNIVERSITAS DIPONEGORO FAKULTAS HUKUM
e. Kewarganegaraan : INDONESIA
- Untuk melakukan penelitian/survey/kegiatan dengan :
- a. Judul / Tema : PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PENGABGUBAN KELURAHAN PERAK UTARA DAN KELURAHAN PERAK TIMUR PADA KECAMATAN PABEAN CANTIAN KOTA SURABAYA
- b. Tujuan : Penelitian
- c. Bidang Penelitian : HUKUM
- d. Penanggung Jawab : INDARJA, S.H. M.H.
- e. Anggota Peserta : -
- f. Waktu : 10 April 2023 s.d. 31 Mei 2023
- g. Lokasi : (terlampir)
- Dengan persyaratan :
1. Dalam masa pandemi Covid-19, Pelaksanaan Penelitian/survey/kegiatan wajib menerapkan protokol kesehatan sesuai Peraturan Walikota Surabaya Nomor 67 Tahun 2020;
 2. Untuk kegiatan tatap muka yang berpotensi menimbulkan kerumunan wajib mengajukan permohonan assessment kegiatan yang ditujukan kepada Ketua Satgas Covid-19 Tingkat Kecamatan Wilayah setempat;
 3. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada nomor 2 (dua) sewaktu-waktu dapat berubah mengikuti ketentuan pembatasan kegiatan oleh Pemerintah;
 4. Peserta Penelitian/survey/kegiatan wajib dalam keadaan sehat saat pelaksanaan kegiatan penelitian;
 5. Peserta Penelitian/survey/kegiatan wajib mentaati persyaratan/peraturan yang berlaku di Lokasi/Tempat dilakukan Penelitian serta tidak membebani kepada OPD, Camat, Lurah dalam pengambilan data primer dan sekunder;
 6. Pelaksanaan Penelitian/survey/kegiatan tidak boleh menimbulkan keresahan di masyarakat, disintegrasi bangsa atau mengganggu ketuhanan NKRI;
 7. Rekomendasi ini akan dicabut/tidak berlaku apabila yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan seperti tersebut diatas.

Demikian atas bantuannya disampaikan terima kasih.

WALIKOTA SURABAYA,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Tembusan :
Yth. 1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
2. Saudara yang bersangkutan.

Lampiran
Nomor : 500.16.7.4 / 1526 / S / RPM / 436.7.15 / 2023
Tanggal : 17 April 2023

Kepada :

1. Kepala BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Kota Surabaya
2. Kepala Bagian Hukum dan kerjasama Kota Surabaya
3. Camat Pabean Cantian Kota Surabaya
4. Lurah Tanjung Perak Kota Surabaya

B. Surat Keterangan Pengantar Penelitian dari Kecamatan untuk Kelurahan



PEMERINTAH KOTA SURABAYA KECAMATAN PABEAN CANTIAN

Jl. Teluk Sampit No. 2-A Surabaya 60123
Telp. (031) 3295130 Fax (031) 3295130

Surabaya, 03 Mei 2023

Nomor : 500.16.7.4/ 709 / 436.9.16/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 Lembar
Hal : Penelitian

Kepada :
Yth. Lurah Tanjung Perak

di-
SURABAYA

Menindaklanjuti Rekomendasi Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 500.16.7.4/1526/S/RPM/436.7.15/2023 tanggal 17 April 2023 perihal tersebut pada pokok surat, bahwa :

Nama : Arung Setyawan
Pekerjaan / Instansi : Mahasiswa / Universitas Diponegoro Fakultas Hukum
Tema/ Judul/ tujuan : Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penggabungan Kelurahan Perak Utara dan Kelurahan Perak Timur pada Kecamatan Pabean Cantian Kota Surabaya
Lama Survey : 10 April 2023 s.d 31 Mei 2023
Pengikut : -

Diminta kepada Saudara untuk membantu kegiatan survey dimaksud dengan syarat – syarat ketentuan sebagai berikut :

1. Yang bersangkutan harus mentaati ketentuan / peraturan yang berlaku dimana dilakukan survey / Research/ Penelitian
2. Dilarang menggunakan Quistionare diluar design yang telah ditentukan
3. Yang bersangkutan sebelum dan sesudah melaksanakan survey/ Research / Penelitian harap melaporkan pelaksanaan dan hasilnya pada Dinas / Instansi yang bersangkutan
4. Surat Keterangan ini akan dicabut / tidak berlaku apabila yang bersangkutan tidak memenuhi syarat – syarat serta ketentuan – ketentuan seperti yang diatas

Demikian untuk menjadi maklum

Camat,

Muhammad Anwar Rizal S.STP, M.Si
Pembina Tk I
NIP. 198001301998101001